

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus, S. (2012). *Hukum, Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Kencana.

AJ, P. (2018). *Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana*. 16–37.

Akil, H. A. (2012). *Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pappiptek), LIPI*.

Alfarisa, S., Modal, D. P., Perizinan, P., & Satu, T. (n.d.). Urgensi Pelaksanaan Pengawasan Kemetrolgian Legal Guna Mewujudkan Kabupaten Bangka Selatan Daerah Tertib Ukur. *Penelitian Administrasi Publik*, 7(2), 129–144.

Ali, M. (2012). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.

Alwino, A. (2017). Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, dan “Justice as Fairness” Rawls. *Melintas*, 32(3), 309.
<https://doi.org/10.26593/mel.v32i3.2696.309-328>

Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.

Aridhayandi, M. R. (2017). Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, 8(2), 80.
<https://doi.org/10.28932/di.v8i2.725>

B, F. M. (2022). PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG METROLOGI LEGAL MELALUI PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG DI WILAYAH HUKUM KOTA MAKASSAR (LAW ENFORCEMENT IN THE FIELD OF LEGAL METROLOGY THROUGH THE IMPLEMENTATION OF CALIBRATION AND RE-CALIBRATION IN THE LEGAL AREA OF MAKASSAR CI. In *Sultan Hasanuddin University* (Issue 8.5.2017).

Bakhri, S. (2009). *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Total Media.

Bimo, P. (2011). *Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?* Hukum Online.
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia/>

Birch A.M, J. (2003). *Benefit of Legal Metrology for the Economy and Society*. International Committee of Legal Metrology.

Diskominfo Kab. Magetan. (2021). *Uji Tera Demi Kenyamanan Pedagang Dan Pembeli*. <https://kominfo.magetan.go.id/uji-tera-demi-kenyamanan-pedagang-dan-pembeli/>

Hakiki, A. (2022a). Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang Diterbitkan Berdasarkan Perdamaian Antara Tersangka dan Pelapor Dalam Delik Biasa. *Wacana Paramarta*, 21(1), 25–34.

Hakiki, A. (2022b). Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Yang Diterbitkan Berdasarkan Perdamaian Antara Tersangka dan Pelapor dalam Delik Biasa. *Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 1(2). <https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i2.113>

Hamzah, A. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Kedua). Sinar Grafika.

Harahap, Y. (2017). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika.

Hendra. (2021). *KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM UANG YANG BERSUMBER DARI TINDAK PIDANA ASAL* Hendra Fakultas Hukum Universitas Palembang *PENDAHULUAN Pembaharuan hukum pidana untuk menyamakan hasil dari tindak pidana menjadi seperti hasil yang sah . Dalam b. 19(September), 391–411.*

Howarth, P. (2008). *Metrology – in Short 2 Edition, terjemahan A. Praba Drijarkara*. Jakarta: Puslit KIM-LIPI.

I., D. K. A. G., & Nyoman Djinar, S. (2013). Analisis Potensi Retribusi, Efektifitas, Efisiensi Dan Kinerja Pelayanan Tera Dan Tera Ulang Pada Unit Pelaksana Teknis Metrologi Provinsi Bali. *Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.

Jessie, P. (2016). Analisis Yuridis Terhadap Ganti Rugi Immateril dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen. In *Universitas Sumatera Utara*.

Juwana, H. (2006). Penegakan Hukum dalam Kajian Law and

Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia.
Indonesian Journal of International Law, 3(2).
<https://doi.org/10.17304/ijil.vol3.2.398>

Kader, A. . (2014). Pemeriksaan tersangka oleh penyidik berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana. *Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2, 1–11.

Lailatul, I. (2017). *Analisa Perbandingan Pengujian Kebenaran Pada Penunjukan Volume Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (BBM) Berdasarkan Transduser dan Bejana Ukur Standar (BUS) LAILATUL ISNAENI, Ahzid, S.H., M.Si. 10*, 10–11.

Lintang Sari, Fajhriana; Imanuel, R. (2019). *Identifikasi Tanda Tera Pada Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya Menggunakan Metoda RFID Dan QR Code*.

Maman, B. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Konsep dan Upaya Penanggulangan Kejahatan*. Setara Press.

Mien, R. (2020). PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH PENGAWAS KEMETROLOGIAN TERHADAP MANIPULASI POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Iustitia Omnibusmnibus, I*.

MULLAH, A. I. (2019). SYARAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA PENGGELAPAN DI POLDA ACEH. In *UNIVERSITY OF*

AR-RANIRY DARUSSALAM.

Mulyadi, L. (2012). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*.

Nugraha, S. (2016). Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Socioscientia*, 8(1), 15–22.

Nur Minarno, B. (2009). *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Laksbang Mediatama.

Perdagangan, K. (n.d.). *Rencana Strategis Kementerian Perdagangan*.

Ramdhan, K., & Nusa, A. (2019). *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Setara Press.

Rhiti, H. (2011). *Filsafat Hukum*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ridwan. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press.

Santoyo. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199–204. <https://bit.ly/2FhMAKf>

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suharliati Nelsy, H., Cangara, H., & Bahfiarti, T. (2018). Tingkat Pemahaman Dan Perilaku Tentang Informasi Penggunaan Alat Ukur Timbangan Di Kalangan Pedagang Eceran Pada Dua Pasar Tradisional Di

Makassar. *Komunikasi KAREBA UNHAS*, 7(1).

Suharnoko. (2014). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis*. Kencana.

Sulaiman, A. (n.d.). *Metode Penulisan Ilmu Hukum*. YPPSDM.

Syawali, H., & Imaniyati, N. S. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV Mandar Maju.

UPT Metrologi Legal Awasi BDKT yang Beredar di Kabupaten Bangka Selatan. (2021).

<https://metrologi.bangkaselatankab.go.id/post/detail/1177-upt-metrologi-legal-awasi-bdkt-yang-beredar-di-kabupaten-bangka-selatan>

Wacana Paramarta. (2022). *Ilmu Hukum*, 21(1).

Winarno, N. B. (2011). Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian. *Perspektif*, 16(2), 117. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i2.75>

Yahya, Y. (2006). *Pengantar Manajemen*. Graha Ilmu.

Yuherawan, D. S. B. (2012). Kritik Ideologis Terhadap Dasar Kefilsafatan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana. *Dinamika Hukum*, 2(12). <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.32>.

B. Lampiran

1. Surat Pengantar Dari Dekan Nomor: 1177/UNPAS-FH.D1/N/VI/2022
2. Surat Izin Penelitian Fakultas Hukum Unpas
3. Surat Perintah Tugas Nomor: PKTN.4.4/ST/05/2019
4. Berita Acara Hasil Pengawasan Nomor: 73.7/PKTN.4.4/BA/05/2019

5. Berita Acara Hasil Pengawasan Nomor: 73.1/PKTN.4.4/BA/05/2019
6. Laporan Hasil Pengawasan UTTP Di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Tahun 2019